

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan suatu negara. Pemerintah dibentuk untuk mengatur dan mengendalikan negara, mengambil keputusan politik, dan menjalankan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan nasional, sedangkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan di tingkat lokal. Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab besar pula terhadap pelayanan kepada masyarakat seperti yang tertuang dalam Undang Undang (Trisnawati & achmad, 2014).

Peran kepala daerah dalam mengatur pengelolaan keuangan negara sangatlah penting mengingat sebagian pengelolaan keuangan negara tersebut dialihkan kepada kepala daerah untuk diatur sedemikian rupa. Adanya fungsi pengelolaan keuangan negara oleh kepala daerah, maka transparansi serta akuntabilitas dari kepala daerah pun dituntut dalam menjalankan amanat pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Pemerintah sebagai pelaksana amanat dari rakyat untuk melaksanakan tugasnya, maka diperlukan pertanggungjawabannya di mana berupa Laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah juga merupakan salah satu bentuk kinerja keuangan Pemerintah Daerah selama satu periode, maka Laporan

keuangan tersebut harus diungkapkan untuk dijadikan akses oleh rakyat dalam melihat kinerja pemerintah.

Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan harus mudah diakses oleh masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah setidaknya memuat informasi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini memiliki urgensi untuk mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Laporan kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok yang hasil auditnya telah dilakukan oleh BPK tentang adanya temuan masalah yang diduga merugikan keuangan daerah maupun negara, ternyata sejak sepuluh tahun lalu tidak pernah kegiatan program penyampain informasi keuangannya disampaikan kepada publik, yang memberikan fakta data dan keterangan yang sesuai. Sehingga, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan kas daerah oleh pengelola kas daerah, tidak ada bentuk publikasi yang dilakukan pemerintah kepada seluruh masyarakat Kota Depok khususnya dan Indonesia umumnya. Karena dana yang ada dalam kas daerah bukan hanya dari warga Kota Depok, tetapi juga berasal dari APBD Provinsi Jabar dan APBN serta sumber sah lainnya (Syarif, 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut laporan keuangan yang diungkapkan oleh Pemerintah Daerah dapat diterbitkan dengan cara yang mudah diakses melalui situs website resmi pemerintahan daerah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah mengelola dana yang diterima dari pajak dan sumber-sumber lainnya, serta memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Hanya beberapa Pemerintah Daerah yang secara sukarela memilih untuk mengambil manfaat dari internet sebagai media dalam melakukan pelaporan keuangan (Afryansyah & Haryanto, 2013). Penting untuk mengidentifikasi dan mengamati Pemerintah Daerah yang melakukan pengungkapan pelaporan keuangan di internet secara sukarela serta menguji karakteristik-karakteristik tertentu yang mempengaruhinya. Alasan dari suatu Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan, melakukan atau tidak melakukan pelaporan keuangan di internet secara sukarela, berhubung internet dinilai dapat digunakan sebagai media efektif dan efisien dalam pelaporan keuangan yang dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat akan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Meskipun telah banyak peraturan perundangan yang menganjurkan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, namun pada prakteknya tidak semua bentuk transparansi dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Akibatnya, timbul ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, khususnya terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Tipe Pemerintah Daerah seperti Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten memiliki wilayah, urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan yang berbeda seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentunya akan memiliki penyelenggaraan penyampaian informasi keuangan yang berbeda juga, pemerintah kota yang memiliki masyarakat yang berbeda dengan masyarakat kabupaten dalam hal pendidikan, sosial, ekonomi, karakter masyarakat dan penggunaan teknologi informasi, masyarakat yang ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintahan dengan mudah tentunya akan mendorong pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangannya dengan cara yang mudah diakses yaitu penyampaian informasi keuangan di internet. Dalam hal ini, tipe pemerintahan daerah berhubungan dengan publikasi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Publikasi laporan keuangan daerah juga bergantung kepada ukuran Pemerintah Daerah. Seiring dengan era globalisasi dewasa ini, kepentingan akan akses informasi keuangan sangatlah diperlukan oleh berbagai pihak. Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran Pemerintahan yang besar memiliki kepentingan tersendiri guna melaporkan keuangan daerahnya melalui website Pemerintah Daerahnya. Selain sebagai sarana transparansi, Pemerintah Daerah juga dapat menggunakan sarana tersebut sebagai salah satu cara untuk menarik investor untuk berinvestasi di daerahnya. Ukuran Pemerintah Daerah adalah besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas (Demampour, 1991).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mya Dewi Trisnawati & Komarudin Achmad (2014). Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali temuan penelitian sebelumnya dengan mengambil sampel dan tahun yang berbeda.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh Tipe Pemerintahan Daerah dan Ukuran Pemerintahan Daerah terhadap Publikasi Laporan keuangan Pemerintah di Internet”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tipe Pemerintahan Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten.
2. Bagaimana ukuran Pemerintahan Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten.
3. Bagaimana publikasi Laporan keuangan di internet pada Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten.
4. Seberapa besar pengaruh tipe Pemerintahan Kota/Kabupaten terhadap publikasi Laporan keuangan Pemerintah Daerah di internet pada Provinsi Jawa Barat dan Banten.
5. Seberapa besar pengaruh ukuran Pemerintahan Kota/Kabupaten terhadap publikasi Laporan keuangan Pemerintah Daerah di internet pada Provinsi Jawa Barat dan Banten.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tipe Pemerintahan Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten.
2. Untuk mengetahui ukuran Pemerintahan Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi di Jawa Barat dan Banten.
3. Untuk mengetahui publikasi Laporan keuangan di internet pada Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tipe Pemerintahan Kota/Kabupaten terhadap publikasi Laporan keuangan Pemerintah Daerah di internet pada Provinsi Jawa Barat dan Banten.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran Pemerintahan Kota/Kabupaten terhadap publikasi Laporan keuangan Pemerintah Daerah di internet pada Provinsi Jawa Barat dan Banten.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memperluas ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi mengenai Pengaruh Tipe Pemerintahan Daerah dan Ukuran Pemerintahan Daerah terhadap Penyajian Laporan keuangan

melalui Website.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diuraikan seperti di bawah dengan maksud untuk :

- 1) Bagi pihak Pemerintah Daerah, dimana para perangkat dan aparatur Pemerintah Daerah dapat senantiasa meningkatkan kompetensi dalam penyajian Laporan keuangan serta membantu Pemerintah Daerah dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian Laporan keuangan Pemerintah Daerah berbasis website dalam menentukan kebijakan tersebut.
- 2) Pemakai Laporan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya para masyarakat, investor, kreditor dan donatur serta para stakeholder lain yang secara langsung dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian Laporan keuangan di internet oleh Pemerintah Daerah. Semisal, jikalau pendapatan Pemerintah Daerah tersebut tinggi maka mereka akan melaporkan Laporan keuangannya secara terbuka berbanding terbalik jika sebaliknya. Hal inilah yang dapat menjadi rujukan bagi para investor dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan kerjasama keuangan dengan Pemerintah Daerah.
- 3) Peneliti lain, dalam hal menjadi masukan, saran, referensi kajian-kajian empiris, serta dapat memberikan pengetahuan dan wawasan, untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian Laporan keuangan Pemerintah Daerah berbasis website secara

sukarela.

1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup 35 Kota dan Kabupaten pada wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten.